

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Memasuki era globalisasi tentu aliran dana tidak lagi mengenal batas maka tuntutan transparansi informasi keuangan semakin meningkat bagi para pengguna laporan keuangan domestik maupun internasional. Berbagai tuntutan tersebut membuat akuntansi sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mengelola biaya ekonomi maupun biaya sosial yang berhubungan dengan publik. Organisasi merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Bentuk organisasi di Indonesia sangat beragam salah satunya adalah organisasi nonlaba yang dimiliki oleh pemerintah atau pihak swasta dengan komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan mencari keuntungan finansial. Organisasi nonlaba memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* karena organisasi nonlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada *profit* namun menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Jika suatu organisasi nonlaba memiliki keuntungan (*surplus*) akan digunakan untuk memperbesar skala kegiatan dan memperbaiki sarana dan pra-sarana organisasi nonlaba itu sendiri agar terus berkembang.

Walau diketahui tidak berorientasi pada laba akan tetapi organisasi nonlaba perlu menyadari pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar untuk memberikan kepercayaan kepada donatur dan mencegah penyalahgunaan dana yang telah diberikan. Terdapat berbagai macam kasus penyalahgunaan dana yang diperoleh dari donatur organisasi nonlaba yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, para petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menggunakan uang donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi mulai dari membeli rumah dengan nilai fantastis dan penggajian presiden ACT hingga mencapai Rp250 juta. Yayasan ini juga melakukan penyelewengan dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp 34 miliar (Farisa, 2022) selanjutnya kasus penggelapan dana pembangunan rumah sakit milik Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (YP UMK) sebesar 24 miliar. Kasus ini bermula adanya aduan oleh pihak YK UMK Kudus terkait pembangunan rumah sakit namun kenyataan mengemukakan bahwa para tersangka tak pernah menggunakan dana tersebut untuk pembangunan melainkan mengelabui pihak yayasan dengan menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi serta melakukan pencucian uang (Iman, 2023).

Kasus penyalahgunaan dana organisasi nonlaba selain di Indonesia terjadi juga di berbagai negara salah satunya organisasi *Every Child Douglas County* dimana direktur organisasi tersebut menyelewengkan dana sekitar \$19,000 dari akun organisasi yang seharusnya digunakan untuk membantu anak-anak asuh di wilayah *Douglas County*. Dia menghadapi tuduhan pemalsuan, pencurian, kejahatan komputer, dan penggunaan kartu kredit secara curang. Selanjutnya Mantan pejabat

keuangan sebuah organisasi non-laba di Boston dituduh menyelewengkan dana lebih dari \$1.3 juta. Dia menggunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadi melalui cek palsu dan transfer bank yang tidak sah, serta menggunakan kartu kredit organisasi untuk pembelian pribadi (KQEN News Radio, 2023). Dan kasus besar penyelewengkan dana organisasi nonlaba di luar negeri lainnya berasal dari Sherry Allen, mantan CEO dari *Greater Eastern Credit Union*. Dalam sebuah penyelidikan internal, ditemukan bahwa Allen menyelewengkan dana sebesar \$1.2 juta selama tujuh tahun untuk kepentingan pribadi. Dia menghabiskan uang tersebut untuk menjalani gaya hidup mewah, termasuk berlibur dan membeli barang-barang mewah. Kasus ini terungkap pada November 2017, dan Allen dipecat setelah penyelidikan tersebut (Strozniak, 2018) Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan dana dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap organisasi nonlaba yang ada di luar maupun dalam negeri.

Yayasan merupakan salah satu organisasi nonlaba berbadan hukum yang memiliki hak dan kewajiban independen dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur tentang Pendirian yayasan, Organ Yayasan, Kekayaan Yayasan, Pembubaran Yayasan, Syarat dan tata cara pembubaran yayasan, dan Ketentuan penutup yang berisi ketentuan lain-lain yang terkait dengan yayasan.

Yayasan menggantungkan diri kepada donatur untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalani kegiatan dan operasional yayasan. Transaksi pada yayasan dibedakan dengan organisasi berorientasi laba berdasarkan

adanya transaksi penerimaan sumbangan yang diterima oleh yayasan bersumber dari pemberian para donatur dan masyarakat. Oleh karena itu, akan timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak ada dalam organisasi bisnis yaitu penerimaan sumbangan. Untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang diperoleh maka yayasan harus membuat laporan keuangan dengan format laporan keuangan yang berbeda dengan laporan keuangan organisasi bisnis. Laporan keuangan yayasan menggambarkan pengelolaan keuangan atas penerimaan dana atau kontribusi dari berbagai sumber yang harus dijelaskan kepada pihak internal dan eksternal dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi sebuah yayasan.

Pelaporan keuangan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari Laporan Laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Laporan posisi keuangan, Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk organisasi nonlaba penyusunan laporan keuangan terdiri dari Laporan posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam manajemen keuangan organisasi nonlaba, penting memiliki pedoman atau standar akuntansi yang jelas dalam pelaporan keuangan. Pedoman pelaporan keuangan organisasi nonlaba sejak tahun 1997 mengacu pada PSAK 45 (IAI, 2018b). Seiring berkembangnya zaman kebutuhan akan standar pelaporan keuangan yang lebih jelas menyebabkan adanya perubahan standar akuntansi yang telah ada. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 digantikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35. Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan No. 35 (ISAK 35) secara efektif diberlakukan pada 1 Januari 2020 menggantikan standar terdahulu yaitu PSAK 45 (IAI, 2018a).

Beberapa penelitian mengungkapkan bagaimana ISAK 335 diterapkan dalam organisasi nonlaba dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kualitas program yayasan. Menurut penelitian dari Diningsih et al. (2023) mengungkapkan laporan keuangan pada yayasan hanya dalam bentuk penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diperoleh dari dana BOP dan bisa dikatakan pencatatan keuangan yang sangat sederhana. Selanjutnya pada penelitian Dewi & Herawati (2023) menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah penyusunan laporan keuangan Yayasan Santha Yana masih sangat sederhana, dimana yayasan tersebut belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan karena terkendala sumber daya yang belum memadai dan tergolong yayasan baru. Penguatan terjadi pada penelitian Anjani & Wira Bharata (2022) mengungkapkan penggunaan konsep ISAK 35 pada Yayasan Hati Gembira membuat penyajian laporan keuangan yang detail dan terperinci, laporan keuangan Yayasan menjadi utuh, lengkap dan mudah dipahami serta meningkatkan kualitas yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi sumbangan.

Setiap organisasi harus menerapkan standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, namun pada kenyataan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba seringkali dihadapkan pada dilema antara menjadi profesional dan akuntabel sesuai standar atau bertahan pada dengan mengandalkan rasa percaya diantara sesama pengurus organisasi. Dilema ini dapat diatasi dengan penerapan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). ISAK 35 memberikan panduan bagi yayasan dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga yayasan dapat menyeimbangkan profesionalisme dan akuntabilitas dengan tetap menjaga rasa percaya diantara sesama pengurus organisasi.

Implementasi ISAK 35 pada yayasan dapat membantu yayasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kualitas program. Selain itu, implementasi ISAK 35 juga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program yayasan. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada sebuah yayasan yang bernama “Yayasan Garuda Revolusi”. Yayasan Garuda revolusi merupakan salah satu contoh organisasi nonlaba yang bergerak di bidang sosial dan berperan aktif di lingkungan masyarakat. Yayasan Garuda Revolusi dikategorikan sebagai yayasan baru dan belum menggunakan ISAK 35 sebagai acuan dalam penerapan penyusunan Laporan Keuangan Yayasan. Penerapan ISAK 35 pada Yayasan Garuda Revolusi akan memberikan banyak manfaat, baik bagi yayasan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingannya. Dengan menerapkan ISAK 35, yayasan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap yayasan, tetapi juga mempermudah proses audit dan pelaporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk donor dan pemerintah. Selain itu, dengan laporan keuangan yang lebih

baik, yayasan dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola sumber daya, sehingga mampu meningkatkan dampak sosial dari setiap program yang dijalankan.

Berdasarkan fenomena yang diatas, maka penelitian yang akan dilakukan berjudul **“PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN ISAK 335 PADA YAYASAN GARUDA REVOLUSI”**. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana implementasi ISAK 335 dapat diterapkan dalam Yayasan. Penelitian ini akan mencakup studi literatur tentang ISAK 335 serta studi kasus tentang implementasi ISAK 335 pada yayasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi tentang bagaimana yayasan dapat menerapkan ISAK 35.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Garuda Revolusi yang sudah dijalankan selama ini?
2. Bagaimana implikasi dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 di Yayasan Garuda Revolusi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan yaitu:

1. Untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan Yayasan Garuda Revolusi yang sudah dijalankan selama ini.

2. Untuk mengetahui implikasi dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 pada Yayasan Garuda Revolusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut diantaranya ialah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini berguna untuk para pembaca agar mengetahui bagaimana pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Yayasan Garuda Revolusi sebagai bentuk tanggungjawab terhadap sumber daya yang diperoleh.
- b. Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan dan informasi untuk peneliti selanjutnya terkait dalam hal laporan keuangan organisasi nonlaba.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Yayasan Garuda Revolusi

Diharapkan dengan adanya penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 bisa menjadi alat perbaikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas Yayasan Garuda Revolusi.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Yayasan.

c) Bagi pihak terkait

Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tepat guna dan andal sehingga memudahkan pihak terkait untuk memahami kinerja keuangan yayasan serta memenuhi tuntutan regulasi.

